

TATA KELOLA SUMBER DAYA MATA AIR BERBASIS KOMUNITAS DI DESA PANTI KABUPATEN JEMBER

Eka Septia Pratiwi^{1*}, M. Hamdi HS²
Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia¹²
Email: ekaseptiapratiwi1@gmail.com*

Abstract

Community-based water resource management has emerged as a strategic issue in sustainable rural development. The study aims to analyze patterns of collaboration between village government and local communities in governing the Sumber Tunjung spring located in Panti Village, Jember Regency. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews with ten informants, field observations, and document analysis, using an interactive data analysis model conducted between September 2025 and January 2026. Findings indicate that spring management is largely driven by the social capacity of the community, grounded in social capital, local wisdom, and informal institutions that function effectively within a common pool resources framework. Collective participation among community members contributes to maintaining ecological sustainability and preventing conflicts over water use. However, limited regulatory and institutional roles of the village government result in a form of collaboration that remains informal and insufficiently integrated into village development policies. The study contributes to the discourse on collaborative governance by demonstrating that governing without government can operate effectively in social and ecological terms, yet requires stronger formal institutional support to ensure legitimacy, policy integration, and the long-term sustainability of community-based water resource governance. Strengthening village regulations and integrating spring management into village development planning are recommended as key strategies toward achieving good environmental governance.

Keywords: Collaborative Governance; Community-Based Water Resource Management; Common Pool Resources; Local Wisdom; Governing without Government

Abstrak

Pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam tata kelola Mata Air Sumber Tunjung di Desa Panti, Kabupaten Jember. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara mendalam terhadap 10 orang informan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, dengan analisis data model interaktif pada periode penelitian bulan September 2025 – Januari 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan mata air didominasi oleh kapasitas sosial masyarakat yang bertumpu pada modal sosial, kearifan lokal, dan kelembagaan informal yang efektif dalam kerangka *common pool resources*. Partisipasi kolektif masyarakat mampu menjaga keberlanjutan ekologis dan mencegah konflik pemanfaatan sumber daya air. Namun, keterbatasan peran regulatif dan kelembagaan pemerintah desa menyebabkan kolaborasi yang terbentuk bersifat informal dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan desa. Temuan ini memperluas diskursus *collaborative governance* dengan menunjukkan bahwa praktik *governing without government* dapat berjalan secara sosial dan ekologis, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan formal untuk menjamin legitimasi, integrasi kebijakan, dan keberlanjutan tata kelola sumber daya air berbasis komunitas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi desa dan integrasi pengelolaan mata air ke dalam perencanaan pembangunan desa sebagai strategi menuju *good environmental governance*.

Kata Kunci: *Tata Kelola Kolaboratif; Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Komunitas; Sumber Daya Bersama; Kearifan Lokal, dan Governing without Government*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas menempatkan masyarakat sebagai aktor strategis dalam pengambilan keputusan pengelolaan air. Posisi ini memperluas peran warga dari sekadar pengguna menjadi pengelola yang memahami kebutuhan lokal. Efektivitas model tersebut dipengaruhi oleh kesesuaian antara kelembagaan lokal dan karakter sosial komunitas, termasuk ukuran kelompok, heterogenitas sosial, serta kekuatan modal sosial.

Keberlanjutan sistem suplai air lebih banyak ditentukan oleh kapasitas dan manajemen lokal dibandingkan intervensi eksternal. Partisipasi aktif masyarakat memungkinkan pengambilan keputusan yang adaptif terhadap kondisi ekologis setempat. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa dominasi negara atau sektor swasta sering kali mengabaikan konteks sosial yang menjadi penentu keberhasilan pengelolaan jangka panjang (Nguyen, 2022).

Konsep *common-pool resources* (CPR) merujuk pada jenis sumber daya yang ditandai oleh dua karakteristik utama, yaitu keterbatasan dalam membatasi akses (*non-excludable*) dan tingginya tingkat rivalitas dalam pemanfaatannya (*subtractable*). Karakteristik tersebut memungkinkan setiap individu memanfaatkan sumber daya secara relatif bebas karena tidak adanya pembatasan yang kuat. Situasi tersebut sekaligus menimbulkan konsekuensi bahwa setiap penggunaan oleh satu pihak akan secara langsung mengurangi ketersediaan bagi pihak lain, sehingga menciptakan potensi konflik dan tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya.

Fenomena tersebut menunjukkan implikasi nyata dari karakter CPR yang rentan mengalami degradasi apabila tidak diatur secara kolektif. Sumber daya seperti air memperlihatkan sifat akses terbuka yang membuat pemanfaatannya oleh satu aktor berdampak langsung pada aktor lainnya. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan berbasis kolektif menjadi prasyarat utama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus meminimalkan risiko eksploitasi berlebihan (Hall, 2011).

Efektivitas pengelolaan CPR sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan sosial yang berkembang di tingkat komunitas. Norma bersama berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam pemanfaatan sumber daya. Jaringan sosial dan tingkat kepercayaan antarpengguna memperkuat kepatuhan terhadap aturan yang disepakati (Ansell & Gash, 2008)

Pengawasan berbasis komunitas berperan penting dalam mencegah eksploitasi berlebihan sumber daya air. Kelembagaan lokal yang kokoh menjadi mekanisme pengendali terhadap potensi *tragedy of the commons*. Aksi kolektif masyarakat semakin efektif ketika ditopang nilai sosial dan budaya lokal yang mengikat perilaku individu (Saksana & Thio, 2019).

Penguatan modal sosial menjadi fondasi tumbuhnya kesadaran ekologis dalam komunitas lokal. Jaringan kerja sama dan norma kolektif membentuk identitas masyarakat sebagai pengelola aktif sumber daya alam. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh peran negara, tetapi juga oleh legitimasi sosial dan tanggung jawab kolektif (Winterford, 2016).

Masyarakat Desa Panti mengorganisasi diri melalui kelompok pengelola air dan komunitas lingkungan yang memiliki visi keberlanjutan sumber mata air. Struktur sosial ini mencerminkan nilai kemandirian dan gotong royong sebagai dasar tindakan kolektif. Pola partisipasi tersebut sekaligus memperlihatkan keterbatasan peran pemerintah desa dalam fungsi fasilitasi dan regulasi.

Ketimpangan peran antaraktor memperkuat urgensi kolaborasi dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi prasyarat terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut keterlibatan seimbang antara masyarakat dan pemerintah desa.

Landasan teoretis pengelolaan tersebut sejalan dengan pemikiran Elinor Ostrom (1990) mengenai *common-pool resources* (CPR). Ostrom menegaskan bahwa sumber daya bersama rentan tereksplorasi tanpa aturan kolektif. Teori ini juga menunjukkan kapasitas masyarakat lokal dalam membangun norma dan mekanisme internal secara mandiri.

Fenomena awal pengelolaan Sumber Tunjung menunjukkan dominasi peran masyarakat dibandingkan pemerintah desa. Partisipasi warga mencakup pengambilan keputusan, perumusan aturan internal, serta pelaksanaan konservasi. Kondisi ini mencerminkan tingginya kesadaran kolektif sekaligus lemahnya peran struktural pemerintah desa (Hamdi et al., 2023)

Pelestarian budaya dan spiritualitas masyarakat Desa Panti digerakkan oleh Komunitas Sumber Tunjung sebagai aktor utama. Komunitas

ini mengemas tradisi lokal seperti Sedekah Bumi dan Tilik Sumber dalam Festival Sumber Tunjung. Kegiatan tersebut berfungsi sebagai media edukasi ekologis dan spiritual lintas generasi.

Komunitas Sumber Tunjung memegang peran vital sebagai penjaga nilai budaya dan penggerak kesadaran ekologis lokal. Peran ini memperkuat keterikatan masyarakat terhadap sumber air sebagai bagian dari identitas sosial. Keberlanjutan upaya tersebut membutuhkan dukungan kebijakan formal dan penguatan kelembagaan desa.

Pembentukan Peraturan Desa menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber air sekaligus memperkuat sistem sosial yang telah berkembang di tingkat komunitas. Dukungan anggaran dan pembinaan kelembagaan diperlukan untuk mengonsolidasikan praktik kolektif yang selama ini berjalan secara informal. Kejelasan kebijakan akan mengintegrasikan pelestarian sumber air ke dalam agenda pembangunan desa sehingga tercipta kesinambungan antara kekuatan sosial masyarakat dan legitimasi formal pemerintahan.

Dominasi peran masyarakat Desa Panti selaras dengan konsep *common-pool resources* yang menekankan pengelolaan kolektif berbasis komunitas (Logroño & Gallego-Bono, 2023). Penguatan empiris menunjukkan bahwa lebih dari 75% aktivitas pengelolaan sumber air, mulai dari distribusi, pemeliharaan, hingga konservasi, dilakukan secara swadaya oleh masyarakat (Sumber: Pengelola Mata Air Tunjung 3/11/2025). Tingkat partisipasi kolektif juga tergolong tinggi, yang tercermin dari keterlibatan rutin warga dalam kegiatan konservasi serta keberlanjutan praktik lokal yang berjalan secara konsisten. Hasil observasi memperlihatkan tidak adanya konflik terbuka dalam pemanfaatan air serta kondisi ekologis sumber mata air yang tetap terjaga, ditandai oleh stabilitas debit dan kebersihan lingkungan. Data tersebut menegaskan bahwa kapasitas sosial masyarakat berada pada kategori kuat, yang ditopang oleh kepercayaan, norma kolektif, dan solidaritas sosial dalam pengelolaan sumber daya.

Kekuatan kapasitas sosial tersebut sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan pada aspek dukungan kelembagaan formal pemerintah desa. Ketergantungan pada mekanisme sosial tanpa penguatan regulasi berpotensi menimbulkan kerentanan dalam jangka panjang, terutama ketika terjadi tekanan eksternal atau perubahan struktur sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan berbasis komunitas tetap memerlukan dukungan kebijakan yang mampu memperkuat legitimasi, integrasi perencanaan, serta keberlanjutan tata kelola sumber daya air secara lebih sistematis.

Kesenjangan empiris dan teoretis muncul dalam tata kelola sumber daya air antara masyarakat dan pemerintah desa. Pengelolaan berbasis komunitas berjalan tanpa dukungan kelembagaan formal. Ketidakseimbangan ini berpotensi melemahkan keberlanjutan pengelolaan jangka panjang (*Pendekatan Kelembagaan Dalam Studi Administrasi Publik*, n.d.).

Fenomena mikro di Desa Panti membuktikan bahwa keberhasilan kearifan lokal tidak meniadakan peran negara (Williamson, 2000). Kapasitas sosial masyarakat telah terbukti memadai dalam menjaga sumber air. Legitimasi kebijakan tetap diperlukan agar tata kelola diakui secara administratif dan hukum.

Pemerintah desa memiliki dasar hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan kewenangan desa dalam mengatur urusan lokal berbasis prakarsa masyarakat. Tanpa peran aktif pemerintah desa, pengelolaan Sumber Tunjung berisiko tetap berada pada ranah swadaya.

Efektivitas pengelolaan mata air berbasis kemitraan menuntut penerapan prinsip pemerintahan yang baik. Partisipasi memastikan kebijakan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas mencegah dominasi kepentingan serta menjamin tanggung jawab administratif.

Tantangan utama terletak pada lemahnya kapasitas kelembagaan desa dan kurangnya koordinasi antaraktor. Pengelolaan sumber air belum terintegrasi dalam RPJMDes dan APBDes. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi penguatan peran kelembagaan desa.

Tantangan utama penelitian ini terletak pada lemahnya kapasitas kelembagaan desa serta belum optimalnya koordinasi antaraktor dalam pengelolaan sumber daya air. Keterbatasan tersebut tercermin pada belum terintegrasinya pengelolaan sumber air ke dalam dokumen perencanaan strategis desa seperti RPJMDes dan APBDes. Situasi ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan desa menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan tata kelola sumber daya yang lebih sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Kebutuhan tersebut mendorong penelitian ini untuk mengisi kesenjangan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang terukur dan kontekstual. Revitalisasi Sumber Tunjung diarahkan untuk berkontribusi pada pencapaian SDG Desa 6 melalui peningkatan akses air bersih dan sanitasi berbasis pengelolaan komunitas yang lebih efektif. Upaya tersebut sekaligus mendukung SDG Desa 15 melalui penguatan konservasi

lingkungan dan perlindungan ekosistem sekitar sumber air, sehingga berimplikasi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Hamdi et al., 2025)

Rangkaian fenomena dan landasan normatif menunjukkan perlunya keseimbangan peran antara masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah desa berperan strategis dalam regulasi dan pendanaan, sedangkan masyarakat unggul dalam pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini mengkaji kolaborasi kedua aktor untuk memperkuat tata kelola sumber daya air berbasis komunitas yang berkelanjutan dan berprinsip pemerintahan yang baik (Utomo & Hamdi, 2025).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan serta revitalisasi Mata Air Sumber Tunjung di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap makna, proses, dan interaksi sosial yang berkembang secara kontekstual di tingkat lokal (Ahyar et al., 2020).

Pengumpulan data menjadi tahap awal yang menentukan kualitas analisis penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang relevan. Informan dipilih secara purposive dengan melibatkan aparat desa, pengelola komunitas, tokoh lokal, dan masyarakat yang terlibat langsung, sehingga data yang dihasilkan bersifat kontekstual dan representatif.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang berlangsung secara simultan sepanjang proses penelitian. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan agar analisis lebih terarah. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi dan kategorisasi tematik untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antarfenomena.

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data yang terus diverifikasi dengan temuan lapangan. Proses ini memastikan hasil penelitian memiliki konsistensi dan dasar empiris yang kuat. Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode untuk menjamin kredibilitas serta validitas hasil penelitian (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Mata Air sebagai *Common Pool Resource*

Pengelolaan Mata Air Sumber Tunjung di Desa Panti merepresentasikan karakteristik *common pool resource* (CPR) yang menuntut pengaturan kolektif dalam pemanfaatannya. Sifat sumber daya yang memiliki akses terbuka sekaligus tingkat rivalitas tinggi menjadikan air rentan terhadap eksploitasi tanpa mekanisme kontrol bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mampu membangun sistem pengelolaan berbasis komunitas melalui kelembagaan informal, norma sosial, dan kearifan lokal yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya (Williamson, 2000).

Kapasitas komunitas dalam membangun sistem tersebut tercermin melalui keberadaan norma sosial yang berfungsi sebagai mekanisme pengaturan internal. Hasil wawancara dengan Irham Fidaruzziar selaku pengelola mata air Sumber Tunjung menunjukkan bahwa kesepakatan tidak tertulis telah menjadi pedoman kolektif dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan air.

“Kami tidak memiliki aturan tertulis, tetapi masyarakat sudah memahami batasan dalam pemanfaatan air. Jika terjadi pelanggaran, maka kontrol sosial langsung dilakukan oleh warga.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa kontrol sosial berbasis kepercayaan mampu menggantikan fungsi regulasi formal dalam menjaga keteraturan pemanfaatan sumber daya.

Efektivitas norma sosial tersebut memperlihatkan terbentuknya sistem *self-regulation* yang menjaga keberlanjutan sumber daya secara kolektif. Tingkat kepatuhan masyarakat tidak hanya didorong oleh sanksi sosial, tetapi juga oleh kesadaran bersama terhadap keterbatasan sumber daya. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan pengelolaan CPR sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial dan jaringan kepercayaan antaraktor (Ansell & Gash, 2008).

Kondisi sosial yang kuat tersebut berimplikasi langsung pada terjaganya kualitas ekologis sumber daya air. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa area mata air tetap bersih, vegetasi penyangga terpelihara, serta distribusi air berjalan secara kolektif tanpa konflik terbuka.

Stabilitas ekologis dan sosial tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis komunitas mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pemanfaatan dan upaya konservasi.



Gambar 1. Kondisi Lokasi Mata Air Sumber Tunjung

Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2025

Keberhasilan pengelolaan tersebut diperkuat oleh praktik kearifan lokal yang berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai ekologis. Tradisi seperti *Tilik Sumber* dan *Sedekah Bumi* tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga menjadi instrumen sosial dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air. Nilai-nilai lokal tersebut memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik konservasi yang dijalankan masyarakat (R.A.W. Rhodes, 2017)

Integrasi antara norma sosial dan kearifan lokal membentuk modal sosial yang menjadi fondasi utama keberlanjutan pengelolaan CPR. Partisipasi kolektif, kepercayaan, dan jaringan sosial memungkinkan masyarakat mengembangkan sistem pengelolaan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan. Kapasitas tersebut menunjukkan bahwa komunitas lokal memiliki kemampuan otonom dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh pada intervensi eksternal (Zaenuri et al., 2021)

Kekuatan modal sosial tersebut sekaligus mengungkap adanya keterbatasan pada aspek kelembagaan formal yang belum berkembang secara optimal. Ketergantungan pada mekanisme informal berpotensi menimbulkan kerentanan ketika terjadi perubahan sosial atau tekanan eksternal terhadap sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan jangka panjang memerlukan dukungan kelembagaan formal sebagai penguat sistem pengelolaan berbasis komunitas.

Keterbatasan Peran Pemerintah Desa dalam Penguatan Kelembagaan

Keterbatasan kelembagaan formal menjadi isu krusial yang memengaruhi keberlanjutan pengelolaan Mata Air Sumber Tunjung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Panti belum

menjalankan fungsi regulatif dan kelembagaan secara optimal dalam mendukung tata kelola sumber daya air. Peran pemerintah desa masih terbatas pada fungsi administratif dan fasilitatif, sehingga pengelolaan lebih banyak bertumpu pada inisiatif masyarakat.

Kondisi tersebut tercermin dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Panti Suroso yang menegaskan belum adanya regulasi khusus terkait pengelolaan mata air.

“Pemerintah desa selama ini hanya mendukung kegiatan masyarakat karena belum ada peraturan desa yang secara khusus mengatur pengelolaan mata air.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya kekosongan kebijakan yang berdampak pada lemahnya legitimasi formal dalam pengelolaan sumber daya.

Ketiadaan regulasi tersebut berimplikasi pada belum terintegrasinya pengelolaan mata air dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Hasil observasi terhadap dokumen RPJMDes dan APBDes menunjukkan bahwa konservasi sumber air belum menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan kapasitas kelembagaan desa dalam menginternalisasi isu lingkungan ke dalam kebijakan publik.



Gambar 2. Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung Pengelolaan Mata Air

Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2025

Keterbatasan kelembagaan tersebut mendorong terbentuknya pola tata kelola yang bersifat informal atau *governing without government*. Masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya, sementara pemerintah desa belum menjalankan fungsi strategis sebagai regulator dan penguat legitimasi. Pola ini menunjukkan ketidakseimbangan peran dalam kerangka *collaborative governance* yang berpotensi menghambat institusionalisasi kolaborasi (Peters & Pierre, 2006).

Ketidakseimbangan tersebut memunculkan ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya. Hasil wawancara dengan Moch Sibrom Muraysi selaku tokoh masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan akan dukungan regulatif dan fasilitatif yang lebih kuat.

“Kami berharap pemerintah desa dapat membuat aturan dan memberikan dukungan lebih agar pengelolaan ini bisa berkelanjutan.”

Harapan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara kapasitas sosial masyarakat dan legitimasi kelembagaan formal.

Kebutuhan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan berbasis komunitas memerlukan dukungan institusional untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Regulasi formal, pembinaan kelembagaan, dan alokasi anggaran menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem pengelolaan yang telah terbentuk. Ketiadaan intervensi formal berpotensi melemahkan stabilitas tata kelola, terutama dalam menghadapi tekanan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks (Hamdi et al., 2025).

Penguatan kapasitas kelembagaan desa menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan praktik lokal ke dalam sistem pemerintahan formal. Pembentukan Peraturan Desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi ke dalam perencanaan pembangunan desa dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Upaya tersebut memungkinkan terciptanya keseimbangan antara peran masyarakat sebagai pengelola utama dan pemerintah desa sebagai penguat sistem tata kelola yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan Mata Air Sumber Tunjung bertumpu pada kapasitas sosial masyarakat yang dibangun melalui modal sosial, kearifan lokal, dan kelembagaan informal yang efektif dalam kerangka common pool resources. Dominasi peran masyarakat tersebut menunjukkan kemampuan kolektif komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air secara sosial dan ekologis. Keterbatasan peran regulatif dan kelembagaan pemerintah desa menciptakan ketimpangan kolaborasi yang berpotensi melemahkan keberlanjutan jangka panjang. Temuan ini memperluas diskursus collaborative governance dengan menunjukkan bahwa praktik governing

without government dapat berjalan efektif, tetapi tetap memerlukan penguatan kelembagaan formal untuk menjamin legitimasi, integrasi kebijakan, dan keberlanjutan tata kelola sumber daya air berbasis komunitas.

Arah penelitian selanjutnya perlu difokuskan pada pengujian komparatif model tata kelola serupa di komunitas lain dengan karakter sosial, budaya, dan kelembagaan yang berbeda. Pendekatan lintas wilayah penting untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan replikasi model berbasis komunitas. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model hibrida yang mengintegrasikan kekuatan kelembagaan informal masyarakat dengan dukungan formal pemerintah, sehingga menghasilkan desain tata kelola yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam berbagai konteks perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hall, C. M. (2011). A typology of governance and its implications for tourism policy. 19(June), 437–457. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.570346>
- Hamdi, M. H., Muhammadiyah, I. G. El, & Darma, I. G. M. (2025). Kompleksitas Governansi Dan Kelembagaan Wisata Bahari Di Watu Ulo, Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 11(1), 45–52.
- Hamdi, M. H., Wicaksono, I., & Darma, I. G. M. (2023). Institutional And Governance Complexity Of Payangan Marine Jember Tourism. *Politico*, 23(2), 174–195.
- Logroño, M. F. C., & Gallego-Bono, J. R. (2023). Approaches to Economic Institutionalism: A

- Theoretical Review of its Characteristics and Elements of Study. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(3), 66. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0060>
- Nguyen, B. (2022). Does Local Environmental Governance Improve Tourism Companies' Performance? Evidence from Vietnam. *Journal of Travel Research*, 61(4), 747–761. <https://doi.org/10.1177/00472875211002653>
- Pendekatan Kelembagaan Dalam Studi Administrasi Publik. (n.d.).
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). Handbook of public policy. *Handbook of Public Policy*, 1–512. <https://doi.org/10.4135/9781848608054>
- R.A.W. Rhodes. (2017). Understanding Governance 20 Years On. *Understanding Governance*, 1–29. <http://www.raw-rhodes.co.uk/wp-content/uploads/2017/07/National-Governance-Review.pdf>
- Saksana, A. C., & Thio, S. (2019). Atribut-Atribut Yang Dinilai Penting Oleh Wisatawan Domestik Dan Wisatawan Cina Dalam Memilih Hotel Di Bali. *Jurnal Manajemen Perhotelan*, 5(1), 9–17. <https://doi.org/10.9744/jmp.5.1.9-17>
- Utomo, S., & Hamdi, M. H. (2025). Tata Kelola Biaya Transaksi Dalam Layanan Perbankan Digital: Analisis Kelembagaan dan Implikasi Administratif. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan (JPP)*, 7(2), 127–136.
- Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613. <https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595>
- Winterford, K. (2016). A positive notion of power for citizen voice and state accountability. *Development in Practice*, 26(6), 696–705. <https://doi.org/10.1080/09614524.2016.1195793>
- Zaenuri, M., Musa, Y., & Iqbal, M. (2021). Collaboration Governance In The Development Of Natural Based Tourism Destinations. *Journal of Government and Civil Society*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.2839>